

INTEGRASI KEILMUAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

DI UIN SE-INDONESIA:

Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Nurlena Rifai, Fauzan, Wahdi Sayuti, Bahrissalim

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: n.rifai@yahoo.com

Abstract: This research is based on the reasoning that transformation of IAIN to UIN can not release the expectation to do the integration of science and shake off dichotomy both Islam and science. The dichotomous of Islam and science appear in cosequence of the differences at the level of ontological, epistemological and axiological in religious sciences (Islam) and general sciences. In response to preliminary research and findings with respect to science integration in UIN, researchers assume to do comprehensive research to find out at analyzing the implementation of the integration of science in UIN throughout Indonesia, especially in the context of curriculum design and the learning process.

Keywords: dichotomy, integration, curriculum, learning process

Abstrak: Penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa transformasi IAIN ke UIN tidak dapat dipisahkan dari harapan untuk melakukan integrasi ilmu pengetahuan dan dari dikotomi baik Islam dan ilmu pengetahuan. Dikotomi Islam dan ilmu pengetahuan muncul dalam konsekuensi perbedaan pada tingkat ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam ilmu-ilmu agama (Islam) dan ilmu-ilmu umum. Menanggapi penelitian pendahuluan dan temuan yang berkaitan dengan integrasi ilmu di UIN, peneliti berasumsi untuk melakukan penelitian yang komprehensif untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan integrasi ilmu di UIN seluruh Indonesia, terutama dalam konteks desain kurikulum dan proses pembelajaran.

Kata Kunci: dikotomi, integrasi, kurikulum, proses belajar

Pendahuluan

Integrasi keilmuan lahir dari pemikiran tentang adanya fakta pemisahan (*dikotomi*) antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Banyak faktor yang menyebabkan ilmu-ilmu tersebut dikotomis atau tidak harmonis, antara lain karena adanya perbedaan pada tataran ontologis, epistemologis dan aksiologis kedua bidang ilmu pengetahuan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu agama Islam bertolak dari wahyu yang mutlak benar dan dibantu dengan penalaran yang dalam proses penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan wahyu (*revealed knowledge*). Sementara itu, ilmu pengetahuan umum yang ada selama ini berasal dari Barat dan berdasar pada pandangan filsafat

yang ateistik, materialistik, sekuleristik, empiristik, rasionalistik, bahkan hedonistik. Dua hal yang menjadi dasar kedua bidang ilmu ini jelas amat berbeda, dan sulit dipertemukan.

Dalam perkembangannya, wacana integrasi keilmuan yang dikembangkan di UIN tampaknya masih berada pada tataran normatif-filosofis dan belum menyentuh ke wilayah-wilayah empirik-implementatif. Salah satu yang terabaikan dalam integrasi keilmuan ini adalah menerjemahkannya ke dalam kurikulum dan pembelajaran, karena bagaimanapun kurikulum dan pembelajaran merupakan bagian penting dalam konteks mengimplementasikan wacana integrasi keilmuan, sehingga tidak hanya berdiri pada posisi normatif-filosofis, tetapi juga harus

masuk ke dalam kurikulum dan pembelajaran secara sistematis.

Namun demikian, untuk melihat integrasi keilmuan dalam kurikulum dan pembelajaran ini tentu saja sangat bergantung kepada pemaknaan masing-masing UIN terhadap konsep integrasi tersebut. Apakah integrasi merupakan perpaduan ilmu agama dan ilmu umum dan melebur menjadi satu ilmu yang tidak terpisahkan atau integrasi dimaknai sebagai islamisasi ilmu pengetahuan atau bahkan integrasi keilmuan dimaknai secara simbolik saja, yakni hanya dengan membuka program studi umum di bawah payung manajemen UIN tetapi antara ilmu umum dan ilmu Islam keduanya berjalan dan diterapkan sendiri-sendiri.

Hanya saja, beberapa UIN masih mengalami kegamangan ketika “membumikan” wacana integrasi ke dalam wilayah yang lebih praktis dan operasional. Misalnya saja, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sampai saat ini belum banyak terjadi perubahan yang signifikan dalam “membumikan” wacana integrasi keilmuan tersebut ke dalam wilayah yang empirik-implimentatif. Bahkan, konsep integrasi di UIN Makassar masih mencari bentuk meskipun pernah dilakukan uji coba Islamisasi Pengetahuan Umum dengan cara membuat buku dasar ilmu-ilmu umum yang di dalamnya “diselipkan” justifikasi ayat terhadap kebenaran sains (ilmu umum).

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan dan jika tidak ditindaklanjuti secara serius, maka konsep integrasi keilmuan hanya berhenti pada tataran wacana dan tidak bisa diterjemahkan ke dalam bentuk yang operasional-empirik. Oleh karenanya, menjadi sangat penting dilakukan kajian yang komprehensif terkait dengan pelaksanaan integrasi wacana keilmuan di UIN se-Indonesia ke dalam wilayah yang operasional-empirik, terutama dalam desain dan pengembangan kurikulum sebagai acuan operasional pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Hasil kajian ini

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengelola UIN se-Indonesia untuk bisa merumuskan secara sistemik, sistematis, empirik dan operasional dalam konteks “membumikan” wacana integrasi keilmuan.

Permasalahan Penelitian

Transformasi IAIN menjadi UIN di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya misi untuk melakukan integrasi antara ilmu umum dan ilmu agama menjadi satu kesatuan ilmu pengetahuan yang memiliki interrelasi dan interkoneksi satu sama lain. Hanya saja dalam implementasinya, integrasi keilmuan di enam UIN mengalami perbedaan dan sampai saat ini belum menemukan formula yang ideal dalam menerjemahkan wacana integrasi keilmuan ke dalam wilayah yang empirik-operasional, misalnya dalam penyusunan kurikulum dan pelaksanaan proses perkuliahan. Perbedaan tersebut tidak bisa dipungkiri, hal itu bermula pada adanya perbedaan dalam memaknai konsep integrasi itu sendiri, sehingga integrasi hanya memiliki kesamaan pada “kulit” tetapi tidak pada “isi”. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang integrasi keilmuan Pengembangan Kurikulum ini diharapkan dapat mengungkap beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana konsep integrasi keilmuan pada masing-masing UIN di seluruh Indonesia?
2. Bagaimana strategi penerapan integrasi keilmuan ke dalam pengembangan kurikulum?
3. Bagaimana penerapan konsep integrasi keilmuan dalam penyusunan silabus, satuan acara perkuliahan dan pelaksanaan perkuliahan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian tentang ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan konsep integrasi yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) se-Indonesia.
2. Menganalisis strategi dan prosedur dalam menerapkan integrasi keilmuan ke dalam penyusunan kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Menganalisis penerapan integrasi keilmuan dalam perkuliahan, mulai dari penyusunan silabus, satuan acara perkuliahan sampai pada pelaksanaan proses perkuliahan.

Landasan Teori

Kerangka Konseptual Integrasi Keilmuan

Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi ilmu dimaknai sebagai sebuah proses menyempurnakan atau menyatukan ilmu-ilmu yang selama ini dianggap dikotomis sehingga menghasilkan satu pola pemahaman *integrative* tentang konsep ilmu pengetahuan. Bagi Kuntowijoyo, inti dari integrasi adalah upaya menyatukan (bukan sekedar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan manusia (ilmu-ilmu integralistik), tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (*other worldly asceticisme*).¹ Integrasi adalah menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai *grand theory* pengetahuan, sehingga ayat-ayat *qauliyah* dan *kauniyah* dapat dipakai.²

Lebih lanjut M. Amir Ali memberikan pengertian integrasi keilmuan: *Integration of sciences means the recognition that all true knowledge is from Allah and all sciences should be treated with equal respect whether it is*

scientific or revealed.³ Kata kunci konsepsi integrasi keilmuan berangkat dari premis bahwa semua pengetahuan yang benar berasal dari Allah (*all true knowledge is from Allah*). Dalam pengertian lain, M. Amir Ali juga menggunakan istilah *all correct theories are from Allah and false theories are from men themselves or inspired by Satan*.

Salah satu istilah yang paling populer dipakai dalam konteks integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum adalah kata "Islamisasi". Islamisasi bermakna *to bring within Islam*. Makna yang lebih luas adalah menunjuk pada proses pengislaman, di mana objeknya adalah orang atau manusia, bukan ilmu pengetahuan maupun objek lainnya.

Dalam konteks islamisasi ilmu pengetahuan, yang harus mengaitkan dirinya pada prinsip tauhid adalah pencari ilmu (*thâlib al-ilm*)-nya, bukan ilmu itu sendiri. Begitu pula yang harus mengakui bahwa manusia berada dalam suasana dominasi ketentuan Tuhan secara metafisik dan aksiologis adalah manusia selaku pencari ilmu, bukan ilmu pengetahuan.

Islamisasi ilmu pengetahuan, menurut Ismail al-Faruqi, menghendaki adanya hubungan timbal balik antara realitas dan aspek kewahyuan.⁴ Walaupun ada perbedaan dalam pola pemetaan konsep tentang islamisasi ilmu pengetahuan yang ditawarkan kedua tokoh tersebut, tetapi ruh yang ditawarkan tentang

³ M. Amir Ali, *Removing the Dichotomy of Sciences: A Necessity for The Growth of Muslims. Future: A Journal of Future Ideology that Shapes Today the World Tomorrow*.

⁴ Ismail al-Faruqi dilahirkan di Jaffa, Palestina pada 1 Januari 1921. Ayahnya bernama Abdullah al-Huda al-Faruqi seorang hakim dan tokoh agama yang cukup terkenal dikalangan sarjana Islam. Keluarganya tergolong kaya dan terkenal di Palestina. Setelah adanya kolonialisme Israel ke negaranya dia bersama sebagian kerabatnya mencari perlindungan ke Beirut Libanon. Al-Faruqi memperoleh pendidikan agama dari ayahnya di rumah dan juga dari masjid setempat. Al-Faruqi mulai sekolah di the Frence Dominical College des Freres pada tahun 1926. Pada 1936, dia melanjutkan sekolah Ilmu seni dan pengetahuan pada American University di Beirut. Dia memperoleh gelar B.A. dalam bidang filsafat (1941) Lihat Ismail al-Faruqi, *Dialog Tiga Agama Besar*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), h.7-8.

¹ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Penerbit: Teraju, 2005), h. 57-58.

² Imam Suprayogo, "Membangun Integrasi Ilmu dan Agama: Pengalaman UIN Malang". dalam Zainal Abidin Bagir (ed)., *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 49-50.

islamisasi ilmu pengetahuan kedua tokoh tersebut sama, yakni bagaimana penerapan ilmu pengetahuan sebagai basis kemajuan umat manusia tidak dilepaskan dari aspek spiritual yang berlandaskan pada sisi normatif al-Qur'an dan al-Sunah. Sebaliknya, memahami nilai-nilai kewahyuan, umat Islam harus memanfaatkan ilmu pengetahuan. Tanpa memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memahami wahyu, umat Islam akan terus tertinggal oleh umat lainnya. Karena realitasnya, saat ini ilmu pengetahuanlah yang amat berperan dalam menentukan tingkat kemajuan umat manusia.

Dari definisi islamisasi pengetahuan di atas, ada beberapa model islamisasi pengetahuan yang bisa dikembangkan dalam menatap era globalisasi, antara lain: model purifikasi, model modernisasi Islam, dan model neo-modernisme.

Dengan melihat berbagai pendekatan yang dipakai Al-Faruqi dalam gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, seperti: (1) penguasaan khazanah ilmu pengetahuan muslim, (2) penguasaan khazanah ilmu pengetahuan masa kini, (3) identifikasi kekurangan-kekurangan ilmu pengetahuan itu dalam hubungannya dengan ideal Islam, dan (4) rekonstruksi ilmu-ilmu itu sehingga menjadi paduan yang selaras dengan warisan dan idealitas Islam, maka gagasan Islamisasi keduanya dapat dikategorikan ke dalam model purifikasi.

Sedangkan model neo-modernisme berusaha memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan mempertimbangkan khazanah intelektual muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia Iptek. Model islamisasi pengetahuan ini muncul pada abad ke-19 dan 20 Masehi. Landasan metodologis islamisasi pengetahuan model ini, menurut Imam Suprayogo adalah sebagai berikut: *Pertama*, persoalan-persoalan kontemporer umat Islam harus dicari penjelasannya dari tradisi dan hasil ijtihad para ulama yang merupakan hasil

interpretasi terhadap Al-Qur'an. *Kedua*, apabila dalam tradisi tidak ditemukan jawaban yang sesuai dengan kondisi kontemporer, maka harus menelaah konteks sosio-historis dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan ijtihad para ulama tersebut. *Ketiga*, melalui telaah historis akan terungkap pesan moral Al-Qur'an yang sebenarnya, yang merupakan etika sosial Al-Qur'an. *Keempat*, setelah itu baru menelaahnya dalam konteks umat Islam dewasa ini dengan bantuan hasil-hasil studi yang cermat dari ilmu pengetahuan atas persoalan yang bersifat evaluatif dan legitimatif sehingga memberikan pendasaran dan arahan moral terhadap persoalan yang ditanggulangi.⁵

Dari berbagai pengertian dan model islamisasi pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa islamisasi dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional-empirik dan filosofis dengan tetap merujuk kepada kandungan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sehingga umat Islam akan bangkit dan maju menyusul ketertinggalannya dari umat lain, khususnya Barat.

Azyumardi Azra mengemukakan ada tiga tipologi respon cendekiawan muslim berkaitan dengan hubungan antara keilmuan agama dengan keilmuan umum. *Pertama*, restorasionis, yang mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat dan dibutuhkan adalah praktik agama (ibadah). Cendekiawan yang berpendapat seperti ini adalah Ibrahim Musa (w. 1398 M) dari Andalusia. Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa ilmu itu hanya pengetahuan yang berasal dari Nabi saja. Begitu juga Abu Al-A'la Al-Maududi, pemimpin jamaat al-Islam Pakistan, menyatakan ilmu-ilmu dari Barat, geografi, fisika, kimia, biologi, zoologi, geologi dan ilmu ekonomi adalah sumber kesesatan karena tanpa rujukan dari Allah swt. dan Nabi Muhammad saw.

⁵ Imam Suprayogo, *Membangun Integrasi Ilmu dan Agama*, h.57.

Kedua, rekonstruksionis interpretasi agama untuk memperbaiki hubungan peradaban modern dengan Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam pada masa Nabi Muhammad saw dan sahabat sangat revolutif, progresif, dan rasionalis. Sayyid Ahmad Khan (w. 1898 M) menyatakan bahwa firman Tuhan dan kebenaran ilmiah adalah sama-sama benar. Jamâl al-Dîn al-Afgânî menyatakan bahwa Islam memiliki semangat ilmiah.

Ketiga, reintegrasi, merupakan rekonstruksi ilmu-ilmu yang berasal dari *al-âyat al-qur'aniyah* dan yang berasal dari *al-âyat al-kawuniyah* berarti kembali kepada kesatuan transendental semua ilmu pengetahuan.⁶

Pengembangan Kurikulum

Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Tonner & Daniel yang mengatakan bahwa kurikulum “... *to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers*”.⁷ Dipertegas lagi oleh pemikiran Glenn Hass yang mengatakan bahwa “...*the curriculum has changed from content of courses study and list of subject and courses to all experiences which are offered to learners under the auspices or direction of school*”.⁸ Sementara Hilda Taba lebih menekankan kurikulum sebagai proses perencanaan belajar, “*a curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of a*

curriculum”.⁹ Dengan demikian, dalam konsep ini kurikulum memiliki dua aspek, yakni sebagai rencana yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.

Untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Nana Syaodih mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

- (1) Kurikulum sebagai suatu ide. Kurikulum dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk dokumen, yang memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.
- (3) Kurikulum sebagai suatu kegiatan. Merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, dan dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran.
- (4) Kurikulum sebagai suatu hasil. Merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.¹⁰

Sementara istilah pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pengembang kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik.

⁶ Azyumardi Azra, *Reintegrasi Ilmu-ilmu dalam Islam* Zainal Abidin Bagir (ed) *Integrasi Ilmu dan Agama, Interpretasi dan Aksi*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 206- 211.

⁷ Tanner Daniel & Tanner Laurel. N., *Curriculum Development*, (New York: Mac Millan Publishing co., inc., 1980), p.51.

⁸ Glenn Hass (ed)., *Readings in Curriculum*, (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1970), p.150.

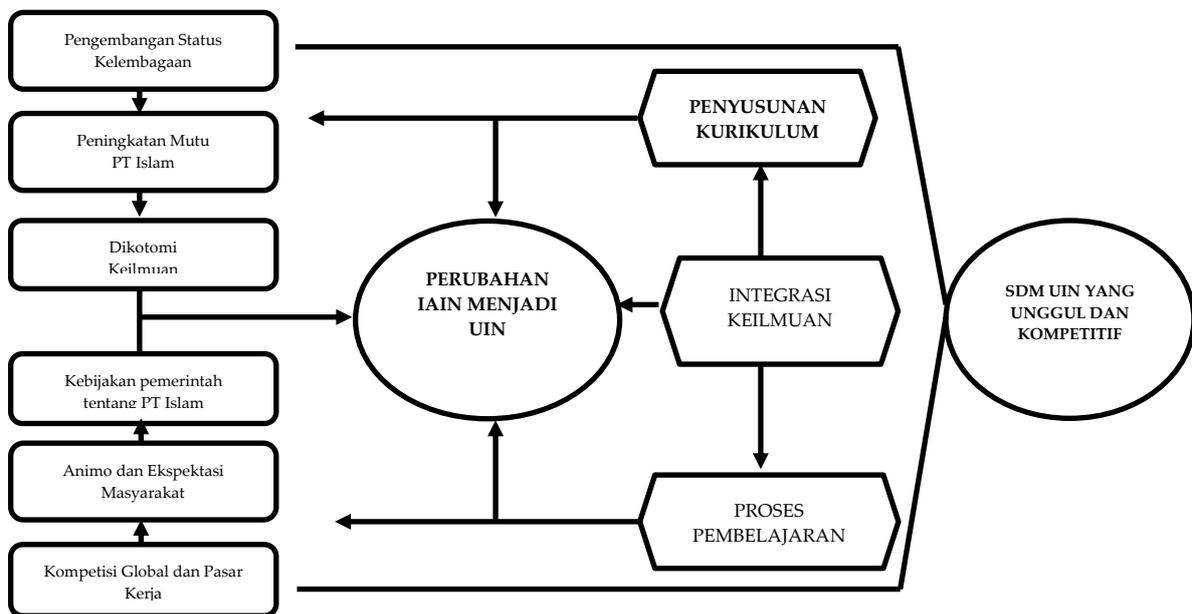
⁹ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practices*, (New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1962), p.212.

¹⁰ Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), p.78.

Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil

kurikulum itu sendiri. Pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan, tetapi melibatkan banyak orang, seperti : politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan.

Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mencari jawaban tentang pencapaian tujuan yang digariskan sebelumnya. Penggunaan metode evaluatif dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan integrasi keilmuan yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) di seluruh Indonesia dalam konteks pengembangan kurikulum.

Untuk memperoleh data penelitian yang memadai, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: (a) studi dokumentasi, (b) penyebaran angket/questioner dan (c) wawancara. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berasal dari

kebijakan integrasi keilmuan, paradigma integrasi keilmuan, struktur kurikulum, silabus, dan satuan acara perkuliahan. *Angket* digunakan untuk memperoleh informasi dari *responden* yang terkait langsung dengan pelaksanaan integrasi keilmuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada *key informan* yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di UIN se-Indonesia. Wawancara ini dilakukan untuk mendalami berbagai temuan dokumentatif dan hasil penyebaran angket terkait dengan pelaksanaan integrasi keilmuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di Universitas Islam Negeri se-Indonesia.

Teknik Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data melalui tahapan penataan data mentah, *editing, coding*, dan tabulasi data. Data yang telah diolah selanjutnya dilakukan analisis. Data kuantitatif dianalisis dengan teknik statistik deskriptif analisis. Dalam analisis statistik deskriptif, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram dan sebagainya, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan gambaran dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan data kualitatif yang diperoleh dari kegiatan wawancara diolah dengan menggunakan pola triangulasi dan dianalisis dengan analisis kualitatif dan *content analysis*.

Temuan dan Pembahasan

Profil Lokasi Penelitian

(1) UIN Sultan Syarif Kasim, Riau

IAIN Suska ini pada mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru. Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka Institut Agama Islam Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sultan Syarif Kasim, yaitu nama Sulthan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan.

IAIN Suska Pekanbaru ini pada mulanya berlokasi di bekas sekolah Cina di Jl. Cempaka, sekarang bernama Jl. Teratai, kemudian dipindahkan ke masjid Agung An-Nur. Lalu pada 1973, barulah IAIN Suska menempati kampus Jl. Pelajar (Jl. K.H. Ahmad Dahlan sekarang). Bangunan pertama seluas 840 m² yang terletak di atas tanah berukuran 3,65 Ha

dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Arifin Achmad, pada tanggal 19 Juni 1973.

Ketika didirikan, IAIN Suska hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun sejak 1998, IAIN Suska mengembangkan diri dengan membuka Fakultas Dakwah. Fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah yang ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada 1997 telah berdiri pula Program Pascasarjana/PPs IAIN SUSKA Pekanbaru.

Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru muncul melalui Seminar Cendekiawan Muslim (1985), Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendekiawan se-Propinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998) seminar merekomendasikan agar IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat senat IAIN Suska pada 9 September 1998 yang menetapkan perubahan status IAIN Suska menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, maka dilakukan persiapan secara bertahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa program studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, program studi Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syari'ah, dan program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN telah pula membuka Program Studi Teknik Informatika. Satu tahun kemudian, dibuka pula Program Studi Teknik Industri. Kedua program studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan di bawah administrasi Fakultas Dakwah.

Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada pada Fakultas di atas dan ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi Fakultas yang berdiri

sendiri. Fakultas-Fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika, Teknik Industri, Sistem Informasi, dan Matematika; Fakultas Psikologi dengan Jurusan/Program Studi Psikologi; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III; dan Fakultas Peternakan dengan program studi Ilmu Ternak dengan konsentrasi Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak dan Teknologi Pakan dan Nutrisi. Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Suska sebagai persiapan UIN SUSKA Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan.

(2) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sejarah berdirinya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bermula dari adanya hasrat umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, untuk mencetak kader-kader pemimpin Islam untuk pembangunan bangsa Indonesia. Gagasan tersebut muncul sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu ketika Dr. Satiman Wirjosandjojo berusaha mendirikan Pesantren Luhur sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama.¹¹

Namun, usaha itu tidak mendapatkan hasil karena adanya hambatan dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda. Selanjutnya pada tahun 1940 Persatuan Guru Agama Islam (PGA) di Padang, Sumatera Barat, mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). Namun berdirinya STI ini hanya berlangsung selama dua tahun hingga tahun

1942 karena pada waktu itu Jepang menjajah Indonesia. Meskipun demikian, berbagai usaha untuk mendirikan perguruan tinggi Islam terus dilakukan oleh para tokoh Islam, sampai kemudian Pemerintah Jepang menjanjikan kepada umat Islam Indonesia untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama yang berkedudukan di Jakarta. Tak lama sesudah itu, sejumlah tokoh Islam mendirikan sebuah yayasan yang diketuai oleh Muhammad Hatta dengan sekretarisnya Muhammad Natsir. Pada 18 Juli 1945 atau bertepatan dengan 27 Rajab 1364 H., yayasan tersebut mendirikan STI yang berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh Abdul Kahar Mudzakkir.

Fakultas Agama yang dibuka di UII kemudian berdiri sendiri dan menjadi sebuah Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN). PTAIN didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 dengan tujuan memberikan pengajaran studi Islam tingkat tinggi dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam. Berdasarkan perkembangan ini maka hari jadi PTAIN ditetapkan pada tanggal 26 September 1950. PTAIN dipimpin oleh KH. Muhammad Adnan sebagai Ketua Fakultas yang pada 1951 telah memiliki mahasiswa sebanyak 67 orang. PTAIN yang baru pertama kali berdiri ini mempunyai tiga jurusan, yakni Jurusan Tarbiyah, Jurusan Qadla, dan Jurusan Dakwah. Mata pelajaran yang diberikan di ketiga jurusan ini meliputi bahasa Arab, Pengantar Ilmu Agama, Fiqih dan Ushul Fiqh, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Kalam, Filsafat, Ilmu Mantiq, Akhlaq, Tasawuf, Perbandingan Agama, Dakwah, Tarikh Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan, Ilmu Jiwa, Pengantar Hukum, Asas-asas Hukum Publik dan Privat, Etnologi, Sosiologi dan Ekonomi.

Setelah PTAIN berdiri di Yogyakarta, pada tanggal 1 Juni 1957 berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. ADIA bertujuan

¹¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pedoman Akademik Tahun 2009/2010*, (Jakarta: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 8.

untuk mendidik dan mempersiapkan para pegawai negeri guna mendapatkan ijazah pendidikan akademi dan semi akademi sehingga mereka menjadi tenaga ahli dalam bidang pendidikan agama, baik pada Sekolah Menengah Umum, Sekolah Kejuruan maupun Sekolah Agama. Lama belajar di ADIA berlangsung selama lima tahun, terdiri atas tingkat semi akademi tiga tahun dan tingkat akademi dua tahun. Berdirinya ADIA pada 1 Juni 1957 ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi atau Dies Natalis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kelanjutan dari ADIA.

Pada awalnya ADIA memiliki dua jurusan, yakni Jurusan Syari'ah dan Jurusan Bahasa Arab. Namun, dalam perkembangannya kemudian, ADIA membuka jurusan khusus, yakni Jurusan Imam Tentara. Mata kuliah yang diajarkannya meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis dan Bahasa Ibrani, Ilmu Guru, Ilmu Kebudayaan Umum dan Indonesia, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Mushthalah Hadis, Fiqih, Ushul Fiqih, Tarikh Tasyri' Islam, Ilmu Kalam/Mantiq, Ilmu Akhlaq/Tasawuf, Ilmu Filsafat, Ilmu Perbandingan Agama dan Ilmu Pendidikan Masyarakat.

Sesuai dengan fungsinya sebagai akademi dinas, mahasiswa yang mengikuti kuliah pada akademi ini terbatas untuk mahasiswa tugas belajar. Mereka adalah para pegawai/guru agama di lingkungan Departemen Agama yang berasal dari berbagai perwakilan daerah di Indonesia. Selama kurang lebih 10 tahun berjalan, PTAIN mengalami kemajuan pesat, baik dari segi jumlah mahasiswa maupun bidang studi agama Islam yang dipelajari. Ratusan mahasiswa berdatangan dari berbagai penjuru tanah air, bahkan dari Malaysia. Demikian juga perkembangan dalam bidang studi Agama Islam, sehingga semakin dirasakan perlunya menambah mata kuliah di IAIN yang mencakup

berbagai aspek kehidupan umat Islam dan perkembangan agama Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam rangka peningkatan pendidikan tinggi Islam, muncul suatu ide untuk mengintegrasikan PTAIN yang ada di Yogyakarta dengan ADIA yang ada di Jakarta ke dalam bentuk institut. Usaha tersebut akhirnya terlaksana dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1960 pada 24 Agustus 1960 atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 1380 Hijriah serta Penetapan Menteri Agama RI No. 35 Tahun 1960. Sejak itu, nama PTAIN pun berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan diresmikan oleh Menteri Agama RI (waktu itu) KH. Wahib Wahab dalam suatu upacara yang bertempat di Gedung Kepatihan Yogyakarta.

Dengan perubahan nama ini, maka berubah pula bidang studi ilmu agama yang diajarkan pada keduanya menjadi beberapa Fakultas agama. Jika IAIN Yogyakarta yang kemudian diberi nama IAIN Sunan Kalijaga membuka Fakultas Ushuluddin (Dasar-dasar Ilmu Agama) dan Fakultas Syari'ah (Hukum Islam), maka IAIN Jakarta yang kemudian diberi nama Syarif Hidayatullah membuka Fakultas Tarbiyah (Ilmu Keguruan) dan Fakultas Adab (Sastra). Mata kuliah yang diajarkan di empat Fakultas ini disesuaikan dengan nama-nama Fakultas tersebut.

Seiring dengan perkembangan IAIN yang demikian cepat yang ditandai dengan adanya cabang-cabang IAIN dengan fakultas-fakultasnya yang tersebar di seluruh Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengembangkan IAIN yang berpusat di Yogyakarta menjadi sebuah institut yang berdiri sendiri. "Pemecahan" cabang IAIN juga dimaksudkan agar memudahkan dalam pengaturan administrasinya. Atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 1963 pada tanggal 25 Februari 1963 diputuskan adanya dua IAIN,

masing-masing IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta.

Bersamaan dengan pengembangan tersebut, kedua IAIN itu kemudian diberi tugas untuk mengoordinasikan cabang-cabang Fakultas masing-masing sesuai dengan wilayah terdekatnya. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengoordinasikan fakultas-Fakultas yang berada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Sedangkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengoordinasikan fakultas-Fakultas yang berada di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera. Peresmian pembagian wilayah kordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1963 dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Menteri Agama RI KH. Wahib Wahab bertempat di Aula IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersamaan dengan itu juga dilakukan serah terima jabatan dari Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. R. H. A. Sunarjo, SH, kepada Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Drs. H. Sunardjo.

Pada saat dilakukan serah terima jabatan tersebut IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah memiliki empat fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab dan Fakultas Ushuluddin di Jakarta dan Fakultas Syari'ah di Serang, Banten. Di samping itu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengoordinasikan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah di Banda Aceh dan Palembang. Kemudian dalam masa dua tahun sampai tahun 1965 dibuka fakultas-Fakultas baru, yaitu Fakultas Tarbiyah di Serang, Cirebon, Padang, dan Pekanbaru, serta Fakultas Syari'ah di Jambi.

Dalam perkembangan selanjutnya, cabang-cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini beberapa di antaranya ada yang berdiri sendiri menjadi IAIN. Pemandirian fakultas-Fakultas cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini dikarenakan semakin tingginya minat umat

Islam setempat untuk memasuki IAIN. Selanjutnya, sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1988, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai IAIN yang memiliki empat fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Dakwah. Selain itu juga memiliki satu cabang, yakni Fakultas Tarbiyah di Pontianak, Kalimantan Barat.

Cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak ini berlangsung selama sembilan tahun. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 seluruh cabang Fakultas IAIN di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak, diubah statusnya menjadi perguruan tinggi Islam yang berdiri sendiri dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Hingga awal tahun 2006, jumlah STAIN seluruhnya terdapat 32 buah.

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu IAIN tertua di Indonesia yang bertempat di Ibukota Jakarta, menempati posisi yang unik dan strategis. Ia tidak hanya menjadi "Jendela Keunggulan Akademik Islam di Indonesia" (*the Windows Academic Excellence Islam in Indonesia*), tetapi juga sebagai simbol bagi kemajuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pembangunan sosial-keagamaan.

Sebagai upaya untuk mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama, lembaga ini mulai mengembangkan diri dengan konsep IAIN dengan mandat yang lebih luas (*IAIN with Wider Mandate*) menuju terbentuknya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Langkah konversi ini mulai diintensifkan pada masa Rektor Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA dengan dibukanya Program Studi Psikologi dan Program Studi Pendidikan Matematika pada Fakultas

Tarbiyah, serta Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam pada Fakultas Syari'ah pada Tahun Akademik 1998/1999. Untuk lebih memantapkan langkah konversi ini, pada tahun 2000 dibuka Program Studi Agribisnis dan Teknik Informatika bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Program Studi Manajemen, dan Program Studi Akuntansi. Pada tahun 2001 Program Studi Psikologi yang semula berada di Fakultas Tarbiyah, ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Psikologi yang berdiri sendiri menyusul dibukanya Fakultas Dirasat Islamiyah bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar, Mesir pada tahun 1999.

Pengembangan IAIN sebagai “*With Wider Mandate*” terus dilakukan, di antaranya dengan mengokohkan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional, antara lain *Islamic Development Bank* (IDB), yang kelak menjadi penyandang dana utama pembangunan gedung Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, McGill University, Canada melalui *Canadian Internasional Development Agency* (CIDA); Leiden University (INIS); Universitas Al-Azhar Kairo, King Saud University (Riyadh), Universitas Indonesia; Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammad Ibnu Su'ud Riyadh; Ohio University, AS, Lembaga Indonesia-Amerika (LIA), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Bank BNI, Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagainya.

Langkah perubahan bentuk IAIN menjadi UIN mendapat rekomendasi dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4/U /KB/2001 dan Menteri Agama RI Nomor 500/2001 tanggal 21 Nopember 2001. Selanjutnya melalui suratnya Nomor 088796/MPN/2001 tanggal 22 Nopember 2001, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memberikan

rekomendasi untuk dibukanya 12 program studi umum, meliputi Program Studi Ilmu Sosial dan Eksakta, yakni Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi, Manajemen, Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Psikologi, Bahasa dan Sastra Inggris, Ilmu Perpustakaan, Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi.

Seiring dengan itu, rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan bentuk IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga telah mendapat rekomendasi dan pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor 02/M-PAN/I/2002 tanggal 9 Januari 2002 dan Nomor S-490/MK-2/2002 tanggal 14 Februari 2002. Rekomendasi ini selanjutnya merupakan dasar bagi dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 031 Tahun 2002 pada 20 Mei Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peresmian dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Hamzah Haz, pada 8 Juni 2002 bersamaan dengan upacara Dies Natalis ke-45 dan Lustrum ke-9 serta pemancangan tiang pertama pembangunan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas bantuan *Islamic Development Bank* (IDB).

(3) UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Sejarah berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tidak lepas dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung karena UIN merupakan kelanjutan dan pengembangan dari IAIN SGD Bandung. IAIN SGD Bandung didirikan pada 8 Agustus 1968 M bertepatan dengan 10 Muharram 1388 H berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968. Kehadiran IAIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan hasil perjuangan para tokoh umat Islam Jawa Barat.

Dimulai pada 1967, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, dan cendekiawan Muslim Jawa Barat yang diprakarsai K.H.A. Muiz, K.H.R. Sudja'i, dan Arthata dengan persetujuan KDH Jawa Barat, mereka membentuk Panitia Perizinan Pendirian IAIN di Jawa Barat. Panitia tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Agama RI dengan SK-MA No. 128 Tahun 1967.

Selanjutnya, berdasar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968 secara resmi berdiri untuk pertama kalinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan SK Menteri Agama tersebut, panitia membuka 4 Fakultas: (1) Syari'ah, (2) Tarbiyah, (3) Ushuluddin di Bandung, dan (4) Tarbiyah di Garut. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah di Bandung, Fakultas Syari'ah dan Fakultas lainnya yang ada di Bandung berlokasi di Jl. Lengkong Kecil No.5.

Pada 1973, IAIN SDG Bandung pindah ke Jalan Tangkuban Perahu No. 14 Pada tahun 1974 IAIN SGD pindah lagi ke Jalan Cipadung (sekarang Jl. A.H. Nasution No. 105). Pada tahun 1970, dalam rangka rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas Syari'ah di Sukabumi yang semula berinduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta digabungkan pada Fakultas Induk di Bandung. Sedangkan untuk Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula berafiliasi ke IAIN Syarif Hidayatullah, tanggal 5 Maret 1976 menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada perkembangan berikutnya, pada 1993, didirikan dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab. Pada 1997, pengembangan diarahkan dalam bentuk penyelenggaraan Program Pascasarjana, yang dimulai dengan membuka Program S-2 Pascasarjana. Pada 1997, terjadi perubahan kebijakan penataan sistem rayonisasi untuk IAIN. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden

Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula menjadi cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Cirebon; demikian juga Fakultas Syari'ah Serang yang semula merupakan cabang Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung statusnya menjadi STAIN Serang.

Hingga saat ini, kepemimpinan rektor telah memasuki tujuh periode, yang terdiri dari: Prof. K.H. Anwar Musaddad (1968 - 1972); Letkol H. Abjan Soelaeman (1972 - 1973); Drs. H. Djauharuddin AR (1977 - 1986); Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika (1986 - 1995); Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad., M.Si. (1995 - 2003); Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MS. (2003 - 2007) yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan surat Keputusan Presiden RI Nomor 244/M/tahun 2003 tertanggal 1 Desember 2003. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005, 10 Oktober 2005, bertepatan dengan 6 Ramadhan 1426 H, IAIN berubah statusnya menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

(4) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Secara historis, perkembangan UIN Sunan Kalijaga sejak peresmian PTAIN pada tahun 1951 hingga saat ini dapat dibagi ke dalam beberapa periode sebagai berikut: periode rintisan, periode pembangunan landasan kelembagaan, periode pembangunan landasan akademik, periode pemantapan orientasi akademik dan manajemen, periode pembangunan kelembagaan dan periode penguatan kelembagaan. *Periode rintisan*, dimulai dengan Penegerian Fakultas Agama UII menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950, dan Peresmian PTAIN yang dilaksanakan pada 26 September 1951. Pada periode ini pula terjadi peleburan PTAIN (yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950) dan ADIA (yang

didirikan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tertanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama *Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*. Pada periode ini, PTAIN berada di bawah kepemimpinan K.H.R. Moh. Adnan (1951-1959) dan Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (1959-1960).

Periode Pembangunan Landasan Kelembagaan (1960-1972) ditandai dengan Peresmian IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960. Pada periode ini, terjadi pemisahan IAIN menjadi dua IAIN yang berdiri sendiri, yang pertama berpusat di Yogyakarta dan yang kedua berpusat di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 1963 tertanggal 25 Pebruari 1963. Dan pada periode ini pulalah IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 tertanggal 1 Juli 1965. **Periode Pembangunan Landasan Akademik** (1972-1996) IAIN Sunan Kalijaga dipimpin secara berturut-turut oleh Kolonel Drs. H. Bakri Syahid (1972-1976), Prof. H. Zaini Dahlan, M.A. (selama 2 masa jabatan: 1976-1980 dan 1980-1983), Prof. Drs. H. Mu'in Umar (1983-1992), dan Prof. Dr. H. Simuh (1992-1996). Pada periode ini dilanjutkan pembangunan sarana dan prasarana fisik kampus meliputi pembangunan gedung Fakultas Dakwah, gedung Perpustakaan, gedung Pascasarjana, dan gedung Rektorat. Sistem pendidikan yang digunakan pada periode ini mulai bergeser dari sistem liberal ke sistem terpimpin dengan mengintrodusir sistem semester semu dan akhirnya sistem kredit semester murni. Dari segi kurikulum, IAIN Sunan Kalijaga telah mengalami penyesuaian yang radikal dengan kebutuhan nasional bangsa Indonesia. Jumlah Fakultas bertambah menjadi 5 (lima) buah, yaitu: Fakultas Adab, Fakultas

Dakwah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin.

Sementara Periode Pemantapan Orientasi Akademik dan Manajemen (1996-2001) IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar (1996-1997 dan 1997-2001). Pada periode ini, dilanjutkan upaya peningkatan mutu akademik, khususnya mutu dosen (tenaga edukatif) dan mutu para alumni. Para dosen dalam jumlah yang besar didorong dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana, baik untuk tingkat Magister (S-2) maupun Doktor (S-3) dalam bidang ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu lain yang terkait, baik di Program Pascasarjana IAIN maupun perguruan tinggi lain, di dalam maupun di luar negeri. Demikian pula peningkatan sumberdaya manusia bagi tenaga administratif dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan administrasi akademik.¹²

Sedangkan **Periode Pengembangan Kelembagaan** (2001-2005) bisa juga disebut dengan Periode Transformasi, karena pada periode inilah terjadi peristiwa yang sangat penting dalam perkembangan lembaga pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air ini, yaitu Transformasi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Kalijaga menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tertanggal 21 Juni 2004. Deklarasi UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004. Periode ini berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah (2001-2005), dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Drs. H. Masyhudi, BBA., M.Si., dan

¹² Tim Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Tim Pokja, 2006), h. 56.

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. H. Ismail Lubis, M.A. (Almarhum) yang kemudian digantikan oleh Drs. Maragustam Siregar, M.A. *Periode terakhir adalah Periode Penguatan Kelembagaan* (2006-2010), yang ditandai oleh terpilihnya kembali Prof. Dr. HM. Amin Abdullah, MA., sebagai Rektor untuk periode yang kedua. Meskipun Rektor tetap muka lama, akan tetapi untuk para pembantu Rektornya mengalami perubahan, yakni; Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr. Sukamta, M.A., Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Dr. H. Tasman Hamami, MA., dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Drs. Maragustam Siregar, M.A. Pada periode ini juga ada penambahan Pembantu Rektor, yakni Pembantu Rektor Bidang Kerjasama yang dijabat oleh Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA. Meskipun periode ini adalah penguatan kelembagaan, tetapi rencana pengembangan lembaga tetap terus dilaksanakan.¹³

(5) UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan surat keputusan presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah panitia pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui surat keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang, keduanya merupakan Fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan secara bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan

di Kediri melalui surat keputusan Menteri Agama No. 66 / 1964.

Dalam perkembangannya, ketiga Fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan Fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua Fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam *Rencana Strategis pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke depan (1998/1999-2008 / 2009)*, pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya sungguh-sungguh dan bertanggungjawab usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui surat keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M. Sc, atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu Agama Islam dan bidang ilmu umum, dengan demikian, 21 juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia- Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI

¹³ Tim Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan*, h.75.

H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan, secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan penelitian ilmiah seperti observasi, eksperimentasi, survey, wawancara dan sebagainya, tetapi juga dari al-Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi matakuliah studi keislaman: al-Qur'an, Hadits, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.

(6) UIN Alauddin, Makassar

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.

Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I. dan Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang

pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan sivitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I. melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI. Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.

Konsep Integrasi Keilmuan

Konsep integrasi keilmuan yang dikembangkan di UIN se-Indonesia, secara substansial sesungguhnya mengacu pada muara yang sama, yakni peniadaan dikotomi antara kebenaran wahyu dan kebenaran sains. Dengan kata lain, integrasi keilmuan sesungguhnya ingin memadukan kebenaran wahyu (agama) dengan kebenaran sains yang diimplementasikan dalam proses pendidikan. Namun demikian, konsep integrasi keilmuan di masing-masing UIN ini memiliki keragaman redaksional dan elaborasi yang sangat kontekstual dengan lingkungan masing-masing UIN. Berikut gambaran konsep integrasi keilmuan di 6 UIN se-Indonesia berdasarkan paradigma keilmuan yang dikembangkan.

Tabel 1. Konsep Integrasi Keilmuan
Berdasarkan Paradigma Keilmuan di UIN se-Indonesia

No.	Nama UIN	Paradigma Keilmuan	Konsep Integrasi Keilmuan
1.	UIN Sultan Syarif Kasim	Orientasi ilmu pengetahuan merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu <i>qauliyah/hadhârah an-nash</i> (ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan) dengan ilmu-ilmu <i>kauniyah ijtima'iyah/hadhârah al-'ilm</i> (ilmu kealaman dan kemasyarakatan) dan ilmu <i>hadhârah al-falsafah</i> (ilmu etika kefilosofan).	Integrasi keilmuan merupakan penggabungan antara ilmu agama dan umum. Untuk mencapai ini, tidak cukup dengan memberikan justifikasi ayat al-Qur'an pada setiap penemuan dan keilmuan, memberikan label Arab atau Islam pada istilah-istilah keilmuan dan sejenisnya, tetapi perlu ada perubahan paradigma pada basis keilmuan Barat agar sesuai dengan basis dan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan realitas metafisik, religius dan teks suci.
2.	UIN Syarif Hidayatullah	Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan, karena sumber semua pengetahuan adalah Allah. Oleh karenanya, paradigma keilmuan yang dikembangkan adalah mempertemukan sains dengan kebenaran wahyu.	Integrasi keilmuan merupakan perpaduan intern ilmu agama dan intern ilmu umum, serta integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Perpaduan ini mencakup beberapa 3 aspek atau level, yakni; integrasi ontologis, integrasi klasifikasi ilmu dan integrasi metodologis.
3.	UIN Sunan Gunung Djati	Agama dan sains telah berkembang seiring dengan dinamika keilmuan dan pemikiran manusia. Demikian halnya ilmu pengetahuan dan sains lahir bukan hanya dari penalaran secara mendalam terhadap objek-objek pengetahuan yang terdapat pada materi ciptaan Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah Tuhan sendiri sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Perpaduan antara ayat <i>kauniyyah</i> dengan ayat <i>qur'aniyyah</i> akan melahirkan suatu paradigma keilmuan yang berpijak pada wahyu dan rasionalitas.	Integrasi keilmuan mengikuti filosofi roda yang memiliki 3 komponen, yakni poros (<i>as</i>), jari-jari (<i>velg</i>) dan ban (<i>tire</i>). Ketiga komponen tersebut bekerja secara simultan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karenanya, integrasi keilmuan merupakan integrasi ayat-ayat <i>qur'aniyyah</i> dan ayat-ayat <i>kauniyyah</i> yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
4.	UIN Sunan Kalijaga	Islam mengembangkan ilmu yang bersifat universal dan tidak mengenal dikotomi antara ilmu-ilmu <i>qauliyah/hadhârah al nash</i> (ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan, dengan ilmu-ilmu <i>kauniyyah ijtima'iyah/hadhârah al-'ilm</i> (ilmu-ilmu kealaman dan kemasyarakatan), maupun dengan <i>hadhârah al-falsafah</i> (ilmu-ilmu etis-filosofis).	Integrasi-interkoneksi merupakan bangunan keilmuan universal yang tidak memisahkan antara wilayah agama dan ilmu. Oleh karenanya, integrasi keilmuan adalah integrasi <i>hadhârah al nash</i> , <i>hadhârah al-'ilm</i> dan <i>hadhârah al-falsafah</i> yang dilakukan melalui 2 model, yakni; (1) integrasi-interkoneksi dalam wilayah internal ilmu-ilmu keislaman, dan (2) integrasi-interkoneksi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum.
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim	Meletakkan agama sebagai basis ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Hadis dalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai sumber ayat-ayat <i>qauliyah</i> sedangkan hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis diposisikan sebagai sumber ayat-ayat <i>kauniyyah</i> . Dengan posisinya seperti ini, maka berbagai cabang ilmu pengetahuan selalu dapat dicari sumbernya dari al-Quran dan Hadis. Metafora yang digunakan adalah sebuah pohon yang kokoh, bercabang rindang, berdaun subur, dan berbuah lebat karena ditopang oleh akar yang kuat. Akar yang kuat tidak hanya berfungsi	Integrasi keilmuan merupakan penggabungan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan. Kedua jenis ilmu yang berasal dari sumber yang berbeda itu harus dikaji secara bersama-sama dan simultan. Perbedaan di antara keduanya, ialah bahwa mendalami ilmu yang bersumber dari al-Quran dan hadis hukumnya <i>wajib 'ain</i> bagi setiap mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan mendalami ilmu yang bersumber dari manusia hukumnya <i>wajib kifayah</i> .

6. UIN Alauddin	<p>menyangga pokok pohon, tetapi juga menyerap kandungan tanah bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon.</p> <p>Menghendaki terbukanya dialog antara ilmu-ilmu dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pusat keilmuan. Kedua sumber ini menjwai dan member inspirasi bagi ilmu-ilmu yang ada pada lapisan berikutnya, yaitu ilmu-ilmu keislaman klasik, ilmu alam, ilmu sosial, humaniora, serta ilmu-ilmu kontemporer.</p>	Integrasi keilmuan merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu agama–keislaman-dengan ilmu-ilmu umum –sains dan teknologi.
-----------------	--	---

Berdasarkan pada uraian konsep integrasi keilmuan di masing-masing UIN se-Indonesia sebagaimana tertuang pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa secara substansial, konsep integrasi yang ditawarkan oleh masing-masing UIN sesungguhnya sama, yakni memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum dan menghilangkan dikotomi antar dua keilmuan tersebut. Namun demikian, dari keenam UIN yang mengusung cita integrasi keilmuan ini, nampak hanya 2 (dua) UIN yang sudah secara definitif merumuskan konsep integrasi keilmuan dan disosialisasikan ke sivitas akademiknya, yakni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Implementasi Integrasi Keilmuan dalam Kurikulum

Dalam konteks pelaksanaan integrasi keilmuan dalam penyusunan kurikulum ini, masing-masing UIN memiliki dan menerapkan kebijakan yang berbeda, bahkan ada beberapa UIN yang belum merumuskannya sampai pada tingkat penyusunan kurikulum. Berikut gambaran kebijakan dan strategi implementasi integrasi keilmuan dalam penyusunan kurikulum di seluruh UIN se-Indonesia.

Tabel 2. Kebijakan dan Strategi Implementasi Integrasi Keilmuan dalam Penyusunan Kurikulum di UIN se-Indonesia

No.	Nama UIN	Kebijakan	Strategi
1.	UIN "SUSKA" Riau	Kebijakan dalam bidang kurikulum didasari pada visi UIN Suska dalam mewujudkan universitas Islam Negeri yang mengembangkan ajaran Islam, pengetahuan, teknologi dan seni secara integral di kawasan Asia Tenggara.	Penyelarasan Kurikulum yang memuat integrasi agama dan sains. Pembentukan Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu (BPPM).
2.	UIN "SYAHID" Jakarta	Tidak ditemukan rumusan operasional kebijakan pimpinan UIN Jakarta dalam mengimplementasikan integrasi keilmuan dalam kurikulum.	Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu. Pembentukan Direktorat Akademik. Penyelarasan Kurikulum.
3.	UIN "SGD" Bandung	Kurikulum di UIN Bandung dititikberatkan pada <i>subject centered design</i> dengan tiga variannya, yaitu <i>the subject design</i> (desain subjek atau bidang kajian), <i>the discipline design</i> (desain disiplin ilmu), dan <i>corelated curriculum</i> (kurikulum berkorelasi).	Pembentukan Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Terintegrasi.
4.	UIN "SKJ" Yogyakarta	Kurikulum dikembangkan berdasarkan paradigma integratif-inetrikonektif yang mengacu pada perpaduan antara ilmu-ilmu <i>qauliyyah/hadharah al nash</i> (ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan), ilmu-ilmu <i>kauniyyah ijtima'iyah/hadharah al-'ilm</i> (ilmu-ilmu kealaman dan kemasyarakatan), dengan <i>hadharah al-falsafah</i> (ilmu-ilmu etis-filosofis).	Training Dosen tentang Penerapan Integrasi Kurikulum dalam Silabus dan SAP. Penyelaraasan Kurikulum yang terintegrasi. Pembentukan Direktorat Pengembangan Kurikulum. Pembinaan dosen-dosen Baru untuk mengembangkan kompetensi integratif-

5. UIN "MALIKI" Malang	<p>Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 4 (empat) kekuatan, yakni: kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan. Pimpinan UIN memprakarsai kurikulum berbasis integrasi, yang secara umum dibagi menjadi lima kelompok, yaitu Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).</p>	<p>interkonektif. Pembuatan template pengembangan silabus dan SAP yang integratif-interkonektif. Membuat Ma'had 'Ali. Membuat Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA). Membuat Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI). Membudayakan penulisan buku ajar terintegrasi bagi para dosen. Rekrutmen dosen umum yang hafal AlQur'an. Workshop Kurikulum Terintegrasi Pembentukan Lembaga Kajian Al-Qur'an dan Sains (LKQS). Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM). Review Kurikulum dan silabus untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kurikulum dan silabus yang dipergunakan di Fakultas umum. Mendorong seluruh dosen untuk melakukan penelitian tentang integrasi Islam, sains, teknologi, dan seni minimal 50% per tahun. Penelitian kajian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas umum diupayakan untuk memasukan nilai-nilai agama. Mempublikasikan karya ilmiah staf edukatif diupayakan dipublikasikan internasional --minimal 10 buah per tahun.</p>
6. UIN "ALAUDDIN" Makassar	<p>Ada dua kebijakan penting yang dilakukan oleh pimpinan UIN Alauddin Makassar dalam mengimplementasikan integrasi keilmuan dalam kurikulum; Pertama, Kurikulum adaptif terhadap kebutuhan pasar, up to date terhadap perkembangan iptek dan akomodatif terhadap pengembangan kepribadian mahasiswa; Kedua, Kurikulum tertata sesuai dengan kerangka integrasi keilmuan serta berpijak pada kompetensi program studi.</p>	

Berdasarkan tabulasi di atas, tampak terlihat bahwa secara umum semua UIN memiliki kebijakan operasional yang berkenaan dengan implementasi integrasi keilmuan dalam kurikulum. Hanya saja, dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak menemukan rumusan kebijakan pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam upaya implementasi integrasi keilmuan dalam pengembangan kurikulum yang terintegrasi.

Integrasi Keilmuan dalam Proses Pembelajaran

Dalam konteks pelaksanaan integrasi keilmuan dalam pembelajaran ini, secara umum seluruh UIN di Indonesia memiliki dan menerapkan kebijakan yang berbeda, bahkan ada beberapa UIN yang belum merumuskannya sampai pada tingkat proses pembelajaran dan masih mencari bentuk bagaimana menerapkan integrasi keilmuan dalam pembelajaran. Berikut gambaran kebijakan dan strategi implementasi integrasi keilmuan dalam proses pembelajaran di seluruh UIN se-Indonesia

Tabel 3. Kebijakan dan Strategi Implementasi Integrasi Keilmuan dalam Proses Pembelajaran di UIN se-Indonesia

No.	Nama UIN	Kebijakan	Strategi
1.	UIN "SUSKA" Riau	Kebijakan dalam proses pembelajaran belum banyak dilakukan, tetapi tetap memfasilitasi dosen untuk melakukan kreativitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran.	Optimalisasi kegiatan kurikuler. Optimalisasi kegiatan non kurikuler. Optimalisasi kegiatan ekstra kurikuler. <i>Award</i> kepada mahasiswa lulusan terbaik. <i>Award</i> prestasi akademik bagi dosen.
2.	UIN "SYAHID" Jakarta	Tidak ditemukan rumusan operasional kebijakan pimpinan UIN Jakarta terkait implementasi integrasi keilmuan dalam proses pembelajaran. Selama ini, masing-masing dosen di tiap Fakultas melakukan kreativitas dan inovasi individual dalam menerapkan integrasi keilmuan dalam proses pembelajaran.	Tidak ditemukan strategi implementasi integrasi keilmuan dalam proses pembelajaran karena selain tidak ada dokumentasi tertulis, juga saat ini masing-masing Fakultas di UIN Jakarta mengembangkan model integrasi keilmuan atas dasar kreativitas dan "ijtihad" masing-masing pimpinan Fakultas.
3.	UIN "SGD" Bandung	Proses pembelajaran merupakan ruang bagi dosen untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Pimpinan memberikan otonomi dan kewenangan penuh kepada dosen dalam proses pembelajaran dengan tetap mengacu pada visi, misi, tujuan dan paradigma integrasi keilmuan yang dikembangkan.	Membudayakan penelitian dosen yang terintegrasi. Penulisan buku ajar yang terintegrasi. Penyusunan SAP secara kolektif. Pembuatan jadwal kuliah berdasarkan kompetensi dosen agar integrasi terlaksana. Melakukan evaluasi proses pembelajaran bersama. Training Dosen tentang Penerapan Integrasi keilmuan dalam Proses pembelajaran.
4.	UIN "SKJ" Yogyakarta	Proses pembelajaran merupakan operasionalisasi silabus yang diformulasikan dalam pedoman pembelajaran yang mengacu pada paradigma integrasi-interkoneksi yang memadukan antara ilmu-ilmu <i>qauliyyah/hadhârah al nash</i> (ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan, dengan ilmu-ilmu <i>kauniyyah ijtima'iyah/hadhârah al-'ilm</i> (ilmu-ilmu kealaman dan kemasyarakatan), dengan <i>hadhârah al-falsafah</i> (ilmu-ilmu etis-filosofis).	Workshop strategi pembelajaran integratif-interkoneksi. Sistem seleksi dosen yang mengedepankan keseimbangan kompetensi keagamaan dan umum.
5.	UIN "MALIKI" Malang	Proses pembelajaran mengacu pada kurikulum berbasis integrasi yang berdasarkan visi, misi dan tujuan serta paradigma pohon ilmu yang ditetapkan di UIN Maliki Malang. Selain itu, pimpinan Universitas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan integrasi keilmuan sampai pada pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang dikenal dengan motto: "Universitas Kejar Fakultas".	Pembuatan template pengembangan Rencana Program Kegiatan Perkuliahan Semester (RPKPS) yang integratif-interkoneksi. Tiap tahun Universitas membiayai pendidikan strata 3 (doktor) bagi 40 dosen UIN . Menyusun buku ajar yang mengacu pada paradigma integrasi keilmuan yang dituangkan dalam pohon ilmu. Mengembangkan SAP yang terintegrasi. Membudayakan penulisan skripsi yang terintegrasi.

6. UIN "ALAUDDIN"
Makassar

Belum banyak kebijakan yang dilakukan dalam implementasi integrasi keilmuan pada proses pembelajaran. Yang ada barulah kebijakan yang bersifat umum untuk mendukung berlangsungnya proses pembelajaran yang integratif. Misalnya, a) Transfer ilmu didukung hasil penelitian; b) Revitalisasi Pendidikan Fiqih; c) Tersedianya fasilitas Proses Pembelajaran (PP) di setiap Jurusan/Prodi sesuai kebutuhan dan standar ideal; e) Tersedianya buku standar untuk dosen dan mahasiswa; dan f) Tersedia buku Daras terstandar.

Menyusun paket buku ajar yang memuat integrasi keilmuan antara ilmu umum dan keislaman.

Berdasarkan tabulasi di atas, secara umum masih banyak pimpinan UIN yang belum memiliki kebijakan operasional tentang implementasi integrasi keilmuan dalam proses pembelajaran. Hanya pada UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim saja yang sudah merumuskan kebijakan operasional integrasi keilmuan dalam proses pembelajaran.

Penutup

Secara substantif, seluruh 6 Universitas Islam Negeri (UIN) memiliki konsep integrasi keilmuan yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yakni menghilangkan dikotomi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Namun dalam konteks penggunaan nomenklatur, 2 UIN menggunakan *term* integrasi-interkoneksi, sementara 4 UIN lainnya menggunakan istilah integrasi keilmuan. Selain itu, jika diklasifikasikan terdapat 3 *grade* dalam melihat konsep integrasi keilmuan di UIN se-Indonesia ini, yakni: *Grade Pertama* dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kedua UIN ini telah merumuskan konsep integrasi secara sistematis, mulai dari paradigma filosofis sampai pada operasional penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran. *Grade Kedua*, dimiliki oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kedua UIN ini memiliki konsep integrasi keilmuan, tetapi masih

berbentuk bunga rampai, belum terformulasikan secara operasional dan sampai saat ini belum memiliki buku rujukan operasional yang dapat dijadikan pedoman oleh sivitas akademiknya. *Grade Ketiga*, dimiliki oleh UIN Alauddin Makassar dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kedua UIN ini masih dalam proses memahami dan mempelajari model integrasi keilmuan yang akan dikembangkan.

Sedangkan, strategi penerapan konsep integrasi keilmuan di 6 Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia juga sangat beragam, mulai dari perumusan konsep, sosialisasi, sampai pada penerapan di lapangan. Semua UIN sudah merumuskan konsep integrasi keilmuan ini, meskipun ada variasi pada kejelasan dan ketegasan konsep integrasi keilmuan itu sendiri. Sementara pada konteks sosialisasi, 3 UIN (UIN Yogyakarta, UIN Malang dan UIN Makassar) sudah berupaya mensosialisasikan melalui media seminar, *workshop*, *training* dan media cetak (profil, prospektus, brosur, dan sebagainya). Sedangkan pada konteks implementasi konsep integrasi, saat ini hanya 2 UIN (UIN Yogyakarta dan UIN Malang) yang sudah mencoba menerapkan konsep integrasi keilmuan tersebut ke dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran dan kultur akademik, sementara 4 UIN lainnya masih belum menindaklanjuti konsep integrasi keilmuan ke dalam tataran yang lebih operasional-implementatif, baik dalam

pengembangan kurikulum, pembelajaran maupun dalam kultur akademik.

Dalam penerapan integrasi keilmuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di lingkungan 6 UIN di Indonesia secara umum belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Konsep integrasi keilmuan masih berhenti pada tataran normatif-filosofis dan masih mencari bentuk penerapan yang sesuai dengan masing-masing UIN. Meskipun demikian, UIN Malang dan UIN Yogyakarta sudah berupaya melakukan penerapan konsep integrasi keilmuan dalam pengembangan silabus, SAP, proses pembelajaran dan kultur akademik. Sementara UIN Riau, UIN Jakarta, UIN Bandung, dan UIN Makassar masih berhenti pada tataran normatif-filosofis dan belum ditindaklanjuti dalam bentuk yang lebih operasional-implementatif.

Selanjutnya, penerapan integrasi keilmuan dalam proses pembelajaran belum terlihat sepenuhnya mengacu pada paradigma keilmuan integratif-interkoneksi. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya kebijakan, strategi dan implementasi integrasi keilmuan tersebut dalam proses pembelajaran. Dari 6 UIN di Indonesia, hanya UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah berikhtiar menerapkan integrasi keilmuan ini dalam proses pembelajaran, misalnya dengan membina dan melatih dosen untuk memiliki kompetensi yang integratif dan juga universitas melakukan pembinaan sekaligus “menyekolahkan” dosennya ke jenjang yang lebih tinggi (strata 3) untuk menunjang pelaksanaan integrasi keilmuan dalam proses pembelajaran.

Daftar Pustaka

- Amir, M. Ali, *Removing the Dichotomy of Sciences: A Necessity for The Growth of Muslims. Future : A Journal of Future Ideology that Shapes Today the World Tomorrow*.L.A: Sage. 1969.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2002.
- Daniel, Tanner & Tanner Laurel. N., *Curriculum Development*, New York: Mac Millan Publishing co., inc., 1980.
- Faruqi, al-, Ismail, *Dialog Tiga Agama Besar*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.
- Hass, Glenn (ed)., *Readings in Curriculum*, Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1970.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, cet. II. Jakarta: Penerbit: Teraju, 2005.
- Suprayogo, Imam, “Membangun Integrasi Ilmu dan Agama: Pengalaman UIN Malang”, dalam Zainal Abidin Bagir (ed)., *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005.
- Syaodih, Nana, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Taba, Hilda, *Curriculum Development: Theory and Practices*, New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1962
- Tim Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Tim Pokja, 2006.
- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pedoman Akademik Tahun 2009/2010*, Jakarta: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

